

IMPLIKASI BILINGUALISME PENGAJARAN BAHASA DAERAH TERHADAP KEMAMPUAN SISWA MENJALIN INTERAKSI ANTARETNIK

Budi Suyanto
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hubungan antara bilingualisme siswa (khususnya siswa pembelajar bahasa kedua) yang diperoleh di sekolah dengan kemampuan berkomunikasi secara lintas budaya atau kemampuan menjalin interaksi sosial antaretnik. Diasumsikan bahwa pengajaran bahasa daerah di sekolah memberikan kemampuan bilingualisme dalam diri siswa. Kebilingualan seorang siswa berpengaruh kuat terhadap sikap multikulturalisme atau munculnya perasaan tenggang rasa, solidaritas dan integritas yang menjadi faktor terbentuknya tatanan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat plural. Subjek yang diteliti adalah para siswa SMP yang berlatarbelakang masyarakat plural di Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat di tiga kabupaten tersebut berlatarbelakang masyarakat plural, namun kebijakan pengajaran bahasa daerah yang ditetapkan berbeda. Penelitian ini dilakukan dengan paradigma analitik-kuantitatif. Metode analisis data atau pemahaman data dilakukan melalui dua cara, yaitu (a) mengkuantifikasi data dan menggeneralisasi, dan (b) mengkualifikasi data dan menghubungkan data tersebut dengan konteks sosialnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembelajaran bahasa daerah di 6 SMP negeri dari 3 kabupaten tersebut menghasilkan capaian pembelajaran yang berbeda pada kemampuan bilingualisme siswa; (2) ada hubungan antara bilingualisme dengan kemampuan/kesanggupan siswa berinteraksi dengan etnik lain; (3) ada hubungan antara perilaku berbahasa siswa dengan sikap toleransi, solidaritas, dan integritas dengan lain etnik; (4) penetapan pada salah satu bahasa daerah etnik mayoritas sebagai mata pelajaran di sekolah berkonsekuensi pada siswa yang termasuk dalam etnik mayoritas hanya memperoleh kompetensi di dalam bahasanya sendiri, dan kurang memiliki kemampuan bilingualisme bahasa daerah etnik lain. Siswa dari etnik minoritas tidak memperoleh kompetensi bahasanya tetapi memperoleh kompetensi bahasa etnik mayoritas. Siswa etnik minoritas diuntungkan karena dengan kompetensi yang diperolehnya memiliki kemampuan berinteraksi dalam pergaulan masyarakat etnik mayoritas. Efek negatifnya, karakter, kepribadian keetnikan siswa tidak terbentuk dalam dirinya, lambat laun identitas keetnikannya terkikis oleh dominasi etnik mayoritas.

Kata Kunci: pengajaran bahasa, multikulturalisme, bilingualisme, komunikasi lintas budaya,

1. Pendahuluan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di dalam masyarakat plural dan marjinal, yakni kesenjangan yang disebabkan oleh lemahnya pemahaman dan kesadaran multikultural dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di bumi Indonesia. Berbagai konflik etnik dan kelompok sosial yang terjadi di beberapa tempat di negara kita mencerminkan lemahnya kesadaran multikultural itu. Kesadaran multikultural yang demikian mengena tidak hanya pada individu dan masyarakat, tetapi juga pada lembaga-lembaga pendidikan kita di daerah.

Multikulturalisme (alih-alih pluralisme) belum mendapat tempat yang layak dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum pengajaran bahasa daerah (komponen muatan lokal) yang diterapkan lebih menitikberatkan kepada bahasa daerah etnik dan budaya etnik mayoritas dan mengabaikan bahasa dan budaya etnik minoritas. Kebijakan ini tentu kurang menguntungkan bagi etnik minoritas karena bahasa dan budayanya tidak diberi peluang untuk berkembang menjadi bahasa yang memungkinkan budaya atau cara berfikir etnik itu berkembang. Kebijakan seperti ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan benih konflik.

Karena kondisi latar belakang masyarakat seperti itu, banyak sekolah yang hanya mengajarkan atau memberi satu kompetensi bahasa daerah, meskipun lingkungan sekolah itu bersifat multietnik dan multilingual. Sekolah-sekolah pada umumnya lebih mengutamakan pengajaran bahasa daerah etnik mayoritas dan mengabaikan bahasa etnik minoritas. Kebijakan seperti ini kurang relevan dengan nilai-nilai multikulturalisme karena dapat memarjinalkan bahasa dan budaya etnik minoritas itu.

Muatan lokal dalam KTSP mestinya disusun dengan satuan-satuan pelajaran yang memungkinkan peserta didik kelak memiliki kemampuan dan kesanggupan (*soft skill*) berkomunikasi dengan etnik lain, dapat diterima dan dapat menjalin hubungan yang kohesif dengan orang-orang di sekitarnya yang memiliki perbedaan dengan dirinya, baik perbedaan etnik, bahasa, budaya, agama, dsb. Pengajaran bahasa etnik (minoritas) memungkinkan anak didik yang berbahasa ibu etnik minoritas tersebut dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya,

mampu mengembangkan budayanya, dan mampu mempertahankan identitas keetnikannya.

Kajian dalam artikel ini hanya memfokuskan pada hubungan bilingualisme yang diperoleh siswa di sekolah terhadap kemampuannya dalam menjalin interaksi sosial antaretnik dan kemampuan memelihara kohesivitas sosial.

2. Metode

Masalah akan dikaji dengan pendekatan sociolinguistik yang berbasis multikulturalisme. Dalam paradigma sociolinguistik, masyarakat multilingual (masyarakat yang menggunakan lebih dari satu bahasa) sering menimbulkan keadaan kebahasaan yang disebut dengan multilingualisme atau bilingualisme. Multilingualisme atau bilingualisme (dalam konteks penelitian ini bersinonim) ialah penggunaan dua bahasa atau lebih oleh seseorang atau masyarakat (Richards, dkk.,1985:29). Jika kita berpikir tentang kesanggupan atau kemampuan seseorang berdwibahasa, yaitu memakai dua bahasa, ini disebut *bilingualitas* (dari bahasa Inggris *bilinguality*). Jadi, orang yang “berdwibahasa” mencakup pengertian kebiasaan memakai dua bahasa, *atau* kemampuan memakai dua bahasa. Mungkin dapat dibedakan kedua pengertian itu dengan “kedwibahasaan” (untuk kebiasaan) dan “kedwibahasa-wanan” (untuk kemampuan), tetapi dalam penelitian ini akan dipakai istilah-istilah “bilingualisme” dan “bilingualitas” sebagaimana yang disarankan oleh Nababan (1984). Apabila seseorang memakai dua bahasa dalam pergaulannya dengan orang lain, dia berdwibahasa dalam arti dia bisa melaksanakan kedwibahasaan yang kita akan sebut *bilingualisme*.

Bilingualisme dalam artikel ini tidak hanya dipahami sebagai sebuah “kemampuan” atau “kebiasaan” menggunakan dua bahasa atau lebih oleh seseorang atau masyarakat, tetapi lebih dari itu “kemampuan” atau “kebiasaan” menggunakan dua bahasa atau lebih tersebut tercipta karena tuntutan dalam kehidupan sosial. Sebuah teori umum tentang interaksi bahasa dan kehidupan sosial meliputi berbagai hubungan antara makna linguistik dan makna sosial.

Hal lain yang harus dipahami bahwa kebingualan seseorang belum sepenuhnya dapat menjamin apakah orang tersebut dapat menjalankan norma-norma interaksi sesuai dengan tuntutan masyarakat multikultur. Sebagaimana dinyatakan oleh Gumperz (1972) bahwa bilingualisme belum cukup menjadi dasar untuk menyusun suatu teori atau model interaksi bahasa dan kehidupan sosial. Dari sudut pandang teori atau model seperti itu, bilingualisme bukan merupakan kesatuan fenomena yang otonom. Fakta bahwa bilingualisme hadir di dalam suatu masyarakat atau menjadi bagian dari kemampuan komunikatif seseorang dapat dipertukarkan dengan berbagai dasar hubungan fungsional (sosial). Dan sebaliknya, perbedaan bahasa tidak perlu dinyatakan sebagai dasar hubungan untuk menemukan ekspresi.

Pengajaran bahasa daerah yang berorientasi kepada multikulturalisme menghasilkan capaian pembelajaran bahwa siswa memiliki . Pengajaran yang didasari oleh suatu anggapan bahwa bilingualisme merupakan repertoire linguistik yang memungkinkan seseorang melakukan interaksi bahasa secara lintas budaya atau lintas etnik. Kesanggupan melakukan komunikasi lintas budaya dipahami sebagai penghargaan terhadap budaya lain. Repertoire ini memungkinkan seorang siswa memasuki situasi-situasi sosial tertentu karena setiap situasi menuntut penggunaan kode tertentu. Dengan demikian, ada hubungan timbal-balik antara multikulturalisme dengan bilingualisme. Nilai-nilai multikulturalisme memungkinkan seseorang (yang bilingual) dapat memilih bahasa secara tepat ketika berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda etnik atau berbeda bahasa; dan sebaliknya, bilingualisme dapat menjadi faktor yang memungkinkan nilai-nilai multikulturalisme itu berfungsi sebagai norma interaksi sosial.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pemakaian Bahasa oleh Siswa dalam Ranah Keluarga, Sosial, dan Sekolah

Untuk mengetahui gambaran kebingualan siswa perlu diketahui gambaran pemakaian bahasa oleh siswa yang (dijadikan responden) dalam ranah keluarga, sosial, dan pendidikan. Setiap daerah menunjukkan pemakaian bahasa yang

berbeda-beda dengan besaran kuantifikasi yang tidak sama. Di daerah Mangaran 95% dari 118 responden dan Kapongan 81% dari 118 responden menggunakan bahasa Madura (BM) ketika berinteraksi dengan orang tuanya. Sisanya menuturkan bahasa Indonesia (4%) dan bahasa Jawa (1%). Di Muncar siswa yang menuturkan bahasa Jawa (BJ) ketika berbicara dengan orang tuanya sebanyak 85% dari 124 responden, BM sebanyak 12%, dan bahasa Indonesia (BI) sebanyak 4%. Di Muncar siswa yang menuturkan BJ ketika berbicara dengan orang tuanya sebanyak 51% dari 115 responden, bahasa Using (BU) sebanyak 26%, dan BI sebanyak 12%. Di Sukorambi siswa yang menuturkan BJ ketika berbicara dengan orang tuanya sebanyak 70% dari 122 responden, BM sebanyak 16%, dan BI sebanyak 14%. Di Patrang siswa yang menuturkan BJ ketika berbicara dengan orang tuanya sebanyak 48% dari 126 responden, BM sebanyak 8%, dan BI sebanyak 26%.

Pemakaian bahasa dalam ranah sosial juga menunjukkan dominasi yang berbeda. Pemakaian bahasa dalam ranah sosial di Mangaran 93% dari 118 responden dan Kapongan 84% dari 101 responden didominasi oleh pemakaian BM; di Muncar 77% dari 124 responden didominasi oleh pemakaian BJ; di Rogojampi dari 115 responden pemakaian didominasi oleh BJ 42% dan BU 38%. Di Sukorambi dari 122 responden 73% memakai BJ dan Patrang dari 126 responden yang memakai BJ 45%.

Pemakaian bahasa dalam ranah pendidikan mengalami perubahan. Pemakaian bahasa Indonesia mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pemakaian dalam ranah yang lain. Peningkatan pemakaian bahasa Indonesia ini karena faktor lingkungan. Di Kecamatan Kapongan peningkatan itu mendekati perimbangan dengan pemakaian BM.

Adanya perubahan pemakaian bahasa dalam tiga ranah tersebut menunjukkan bahwa siswa telah memiliki kemampuan bilingualisme (bahasa daerah dan bahasa Indonesia) yang cukup baik karena perubahan itu menunjukkan adanya aktivitas alih bahasa.

Bilingualisme dalam konteks penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai sebuah “kemampuan” atau “kebiasaan” menggunakan dua bahasa atau lebih oleh

seseorang atau masyarakat, tetapi lebih dari itu “kemampuan” atau “kebiasaan” menggunakan dua bahasa atau lebih tersebut tercipta karena tuntutan dalam kehidupan sosial. Sebuah teori umum tentang interaksi bahasa dan kehidupan sosial meliputi berbagai hubungan antara makna linguistik dan makna sosial. Hubungan dalam sebuah repertoire masyarakat atau pribadi tertentu adalah masalah empiris, suatu cara deskripsi yang dilakukan bersama-sama antara linguistik dan etnografi dalam menjelaskan interaksi antara bahasa dan kehidupan sosial.

Hal lain yang harus dipahami bahwa kebingualan seseorang belum sepenuhnya dapat menjamin apakah orang tersebut dapat menjalankan norma-norma interaksi sosial sesuai dengan tuntutan masyarakat multikultur. Sebagaimana dinyatakan oleh Gumperz (1972) bahwa gejala bilingual atau bidialektal telah menjadi fokus utama yang menarik perhatian. Sekalipun begitu bilingualisme belum cukup menjadi dasar untuk menyusun suatu teori atau model interaksi bahasa dan kehidupan sosial. Dari sudut pandang teori atau model seperti itu, bilingualisme bukan merupakan kesatuan fenomena yang otonom. Fakta bahwa bilingualisme hadir di dalam suatu masyarakat atau menjadi bagian dari kemampuan komunikatif seseorang dapat dipertukarkan dengan berbagai dasar hubungan fungsional (sosial). Dan sebaliknya, perbedaan bahasa tidak perlu dinyatakan sebagai dasar hubungan untuk menemukan ekspresi.

Dalam hal ini, kajian yang dilakukan dengan perspektif multikulturalisme akan melengkapi pemahaman tentang bilingualisme sebagai salah satu teori atau model interaksi sosial. Dengan anggapan bahwa bilingualisme merupakan repertoire linguistik yang memungkinkan seseorang melakukan interaksi bahasa secara lintas budaya atau lintas etnik. Kesanggupan melakukan komunikasi lintas budaya dipahami sebagai penghargaan terhadap budaya lain. Dengan demikian, ada hubungan timbal-balik antara multikulturalisme dengan bilingualisme. Nilai-nilai multikulturalisme memungkinkan seseorang (yang bilingual) dapat memilih bahasa secara tepat ketika berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda etnik atau berbeda bahasa; dan sebaliknya, bilingualisme dapat menjadi faktor yang

memungkinkan nilai-nilai multikulturalisme itu berfungsi sebagai norma interaksi sosial.

Bilingualisme tidak hanya menyangkut kompetensi linguistik bahasa tetapi juga kompetensi pragmatiknya. Kompetensi pragmatik ini adalah kemampuan untuk menerapkan bahasa sesuai dengan fungsinya dalam komunikasi. Penerapan bahasa terkait dengan norma sosial. Setiap masyarakat (Jawa, Madura, Using, dan Cina) memiliki sistem nilai yang berfungsi mengatur setiap perilaku warganya. Masyarakat Jawa, misalnya, memiliki nilai budaya yang disebut "tata krama". Istilah ini terkait dengan nilai budaya "tata tentrem". Konsep nilai ini dibangun oleh dua makna, yaitu "tata" 'sesuai dengan aturan, bahwa segala sesuatunya berada di tempat yang semestinya', dan "tentrem" 'damai dan tenang'. Kedua makna ini satu sama lain saling bergantung. "Tata" berarti bahwa alam semesta dengan segala sesuatu yang ada tersusun dengan baik dan selaras. "Tentrem" berarti menjaga hubungan antara alam semesta dan diri sendiri dalam kondisi tetap tenang, dan antara dirinya dengan orang lain dalam keadaan damai. Nilai filosofi "tata tentrem" ini ada dalam pikiran setiap orang Jawa dan mendasari setiap tingkah laku mereka, termasuk tingkah laku dalam berbicara atau berbahasa (Wolff dan Poedjosoedarmo, 1982:14-17). Masyarakat Using sebagai subkultur budaya Jawa juga mengenal sistem nilai "tata tentrem" yang mendasari cara berfikir dan berperilaku mereka dalam menjaga alam semesta dan lingkungan sosialnya tetap dalam keadaan tenang dan selaras. Makna "tata" menurut orang Using tidak terkait dengan pengaturan status seseorang karena dalam budaya mereka tidak membedakan secara tegas peran sosial seseorang dalam masyarakat. Hal ini berbeda dengan masyarakat Jawa atau "wong kulon" (sebutan yang diberikan oleh orang Using kepada masyarakat Jawa) konsep "tata" memberi arti penting kepada status seseorang. Dalam susunan masyarakat Jawa yang hirarkis, setiap anggota masyarakat harus memiliki tempat dan membuat tingkah lakunya sesuai dengan posisinya. Oleh karena itu, ada perbedaan cara penerapan "unggah-ungguhing basa" (*various speech proprieties*) dari kedua masyarakat itu dalam membuat hubungan sosial yang "sreg". Masyarakat Using hanya menggunakan sistem honorifik untuk menempatkan seorang petutur dalam hubungan sosial

tertentu; sedangkan dalam masyarakat Jawa di samping sistem honorifik juga menggunakan tingkat tutur (*speech levels*), seperti ngoko, madya, dan krama.

Kemampuan siswa menggunakan dua atau lebih bahasa daerah dari enam sekolah yang diteliti menunjukkan kuantifikasi yang berbeda. Di SMP Negeri I Kaponan siswa yang bilingual (yang menguasai bahasa daerah etnik lain) berjumlah 18 orang atau 18% dari 101 responden. Di SMP Negeri I Mangaran siswa yang bilingual (yang menguasai bahasa daerah etnik lain) berjumlah 10 orang atau 8% dari 118 responden. Di SMP Negeri I Rogojampi siswa yang bilingual (yang menguasai bahasa daerah etnik lain) berjumlah 83 orang atau 72% dari 116 responden. Di SMP Negeri I Muncar siswa yang bilingual (yang menguasai bahasa daerah etnik lain) berjumlah 34 orang atau 27% dari 124 responden. Di SMP Negeri VII Jember siswa yang bilingual (yang menguasai bahasa daerah etnik lain) berjumlah 58 orang atau 46% dari 126 responden. Di SMP Negeri I Sukorambi siswa yang bilingual (yang menguasai bahasa daerah etnik lain) berjumlah 36 orang atau 30% dari 122 responden.

Out put pembelajaran bahasa daerah kedua pada bilingualisme siswa dapat dikaji dengan cara menghubungkan dua variabel, yaitu bahasa daerah yang diajarkan di sekolah dan bahasa ibu (bahasa pertama) siswa, kemudian disinkronisasi dengan ke bilingualan siswa. Kedua variabel itu harus berbeda untuk dapat menambah repertoire bahasa siswa. Jadi, pengaruh itu hanya bisa dilihat pada siswa yang bahasa ibunya tidak sama dengan bahasa daerah yang diajarkan di sekolah. Luaran (*out put*) pengajaran bahasa daerah terhadap ke bilingualan siswa dapat dirumuskan: *repertoire bahasa ibu + repertoire bahasa daerah yang diajarkan di sekolah*. Luaran pengajaran bahasa daerah di enam SMP Negeri yang diteliti dapat dilihat pada tabel pada kolom yang diarsir.

Tabel (4), jika dicermati, diperoleh penjelasan bahwa proses pengajaran dan pembelajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah tersebut hanya menghasilkan ke bilingualan pada para siswa yang termasuk dalam golongan etnik minoritas. Dampak proses pengajaran dan pembelajaran itu adalah siswa yang termasuk dalam golongan etnik mayoritas lebih mendalami bahasanya sendiri dan kurang memahami bahasa etnik minoritas. Wajar jika para siswa dari golongan etnik

mayoritas banyak yang tidak memiliki kemampuan beralih bahasa ketika berkomunikasi dengan etnik lain (lihat Tabel (6) dan (7)) karena terkendala oleh faktor kemampuan bahasa (lihat Tabel (9)). Pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah multietnik idealnya menghasilkan kemampuan bilingualisme yang timbal balik. Artinya, yang kecil memahami yang besar dan yang besar memahami yang kecil.

Kebilingualan siswa diperoleh melalui jalur informal, di antaranya melalui pendidikan dalam keluarga (21%), pergaulan di kampung (50%), pergaulan di lingkungan sekolah (11%), dan berbagai pergaulan (17%). Data kuantitatif tersebut merupakan persentase dari jumlah responden 107 orang. Jalur pendidikan informal ini justru menyajikan berbagai bahasa yang ada di masyarakat. Sehingga anak dapat belajar bahasa-bahasa itu melalui pergaulannya.

5.4 Implikasi ke bilingualan Siswa dalam Komunikasi Antaretnik

Dalam masyarakat multikultural nilai-nilai yang mendasari perilaku berbahasa itu adalah nilai-nilai multikulturalisme, seperti keadilan, kesederajatan, solidaritas sosial, tenggang rasa, saling menghargai, dan humanisme. Nilai-nilai itu akan tertuang dalam setiap perilaku berbahasa seseorang.

Seseorang yang memiliki kemampuan kedwibahasaan (bilingualisme), memiliki potensi untuk sering mengganti bahasa atau ragam bahasa; hal ini tergantung pada keadaan atau keperluan berbahasa itu. Situasi berbahasa yang berbeda-beda (seperti, pemeran serta, lokasi, jalur, tujuan, dan sebagainya) mempengaruhi terjadinya peristiwa alih kode. Umpamanya, sewaktu kita berbahasa A dengan si P datang si Q yang tidak dapat berbahasa A memasuki situasi berbahasa itu. Oleh karena kita ingin menerima Q dalam situasi berbahasa itu, maka kita beralih memakai bahasa B yang dimengerti Q. Kejadian seperti itu kita sebut *alih kode* (Nababan, 1984).

Menurut Poedjosoedarmo (1979) peristiwa alih kode, si pembicara bukan sekedar mengambil alih kata atau sejumlah kata dari kode lain, tetapi si pembicara paling sedikit mengambil satu klausa dari kode lain. Jadi, di sini peristiwa masuknya unsur asing tidak terbatas dalam leksikon saja, tetapi sudah

menyangkut unit sintaksis yang lebih besar. Peristiwa alih kode karena alasan-alasan atau maksud-maksud tertentu.

Esensi alih kode dalam peristiwa percakapan antaretnik dapat dijelaskan dengan dua pendekatan, yaitu sosiolinguistik dan multikulturalisme. Alih kode menurut pendekatan yang pertama adalah peralihan pemakaian dari suatu bahasa atau dialek ke bahasa atau dialek ke dialek lainnya. Alih kode sepenuhnya terjadi karena perubahan sosiokultural, situasi berbicara, topik, status sosial, penutur, dan sebagainya (Ohoiwutun, 1997). Sedangkan alih kode dilihat dari perspektif multikulturalisme adalah peralihan bahasa ke bahasa lain semata-mata untuk menunjukkan sikap akomodatif dan menghargai atas keterlibatan etnik lain dalam sebuah pembicaraan. Konsep multikulturalisme itu sendiri dapat diartikan sebagai faham yang menghargai keberagaman. Faham yang berazaskan pada keadilan, kesetaraan (egaliter), toleransi, dan saling menghargai.

Kesadaran seseorang untuk beralih alih bahasa (kode) merupakan refleksi dari sikap multikulturalnya. Penelitian ini menemukan rendahnya kesadaran siswa untuk beralih bahasa karena keterbatasan kemampuan biligualismenya. Di Mangaran tingkat kesadaran siswa beralih bahasa 36% dari 118 responden, di Kapongan 20% dari 101 responden, di Muncar 33% dari 124 responden, di Rogojampi 35% dari 115 responden, di Sukorambi 41% dari 122 responden, dan di Patrang 25% dari 126 responden.

Siswa yang memiliki kemampuan biligualisme yang memadai memiliki sikap yang lebih asosiatif dan akomodatif terhadap lawan bicara yang berbeda etnik dengannya. Sikap asosiatif ini berupa keinginan seseorang untuk menyatu atau mendekat dengan orang lain; sedangkan sikap akomodatif adalah sikap menerima segala sesuatu dari pihak lain. Sikap asosiatif dan akomodatif dalam perilaku bahasa salah satunya diwujudkan dengan pemakaian bahasa lawan bicara. Sikap asosiatif yang dimiliki oleh para siswa untuk orientasi diri dilakukan dengan alasan keakraban, secara umum menunjukkan besaran 91% dari 210 responden. Sedangkan alasan tidak melakukan orientasi diri karena tidak menguasai bahasa mitra bicaranya sejumlah 83% dari responden 227 orang.

Perilaku berbahasa seseorang diatur oleh prinsip pemilihan bahasa dan prinsip retorik. Kedua prinsip ini mengorientasi perilaku bahasa penutur terhadap petutur agar tercipta hubungan sosial yang baik dan terhindar dari konflik. Prinsip-prinsip ini bersumber pada nilai-nilai multikulturalisme, seperti keadilan, toleransi, solidaritas (sifat satu rasa), egalitarianisme (merasa sederajat), dan tenggang rasa (dapat menghargai perasaan orang atau pihak lain). Nilai-nilai tersebut sangat cair dan berpadu dalam membentuk sistem sosial.

Nilai multikulturalisme teraktualisasi pada perilaku seseorang ketika ia terlibat dalam sebuah percakapan. Ia harus membuat kesepakatan sebanyak-banyaknya kepada orang yang diajak bicara (petutur), memilih salah satu kode yang memberi kemudahan pemahaman dan menguntungkan pada petutur. Kesepakatan ini cenderung mengarah kepada penggunaan bahasa yang dikuasai atau dimengerti oleh petutur.

Berdasarkan kerangka teoritik di atas kita akan melihat sejauh mana faktor kebingualan dan pandangan multikultur siswa menjadi daya dorong untuk melakukan alih bahasa pada saat mereka berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda etnik. Siswa yang tidak melakukan alih bahasa pada saat berkomunikasi dengan siswa lain yang berbeda etnik tidak dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki sikap akomodatif sama sekali, tapi ada alasan yang kuat mereka tidak melakukan itu. Alasan itu adalah keterbatasan kemampuan menuturkan bahasa daerah lawan bicaranya. Besaran kuantifikasi 83% dari responden 227 orang yang beralasan "tidak menguasai bahasanya" memperkuat pernyataan ini.

5.4.1 Wawasan Multikulturalisme Para Siswa

Perilaku bahasa anak pada dasarnya dilandasi oleh norma sosial, pengetahuan, dan perasaannya. Simpati kepada orang lain adalah perbuatan yang sangat sopan. Sikap inilah yang memungkinkan untuk merealisasi tindakan hormat, tenggang rasa, dan adil terhadap orang lain. Simpati juga memungkinkan siswa untuk menjalin hubungan silaturahmi dan bekerja sama dengan orang lain. Simpati, kesediaan menjalin interaksi sosial dan kesanggupan menjalin kerja sama dengan etnik lain. Menurut hasil penjarangan jejak pendapat 706 responden

berasal dari 6 SMP negeri di 3 kabupaten tersebut diperoleh data kuantitatif yang memiliki sikap simpati terhadap etnik lain sebesar 693 siswa atau 98%; keinginan menjalin interaksi sosial dengan etnik lain yang berelasi dengan etnik lain sejumlah 503 siswa atau 71%; dan yang sudah berelasi dengan etnik lain sejumlah 449 siswa atau 64%. Data kuantitatif tersebut refleksi dari sikap manusiawi yang ada di dalam pikiran dan perasaan para siswa. Pikiran dan perasaan itu merupakan potensi yang sangat positif untuk membentuk kohesivitas sosial.

Potensi yang positif itu harus disaranai atau didukung oleh kemampuan bilingualisme yang bermuatan bahasa-bahasa yang ada di lingkungan masyarakatnya. Tanpa kemampuan bilingualisme ini, potensi positif siswa tidak akan dapat direalisasi dengan baik. Potensi ini seharusnya dikembangkan dalam dunia pendidikan kita melalui proses pendidikan dan pengajaran yang tepat.

5.4.2 Perlakuan Diskriminatif yang Dialami oleh Para Siswa

Unsur lain yang masih terkait dengan kultur adalah masalah diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap orang atau kelompok lain. Diskriminasi mempunyai hubungan erat dengan relasi antara kelompok yang dominan dengan yang minoritas karena perlakuan yang tidak adil, biasanya, sering berasal dari kelompok dominan terhadap kelompok minoritas. Perbedaan-perbedaan kultural seperti perbedaan agama, suku, ras, klas sosial, gender, umur dan bahasa dapat dijadikan objek dan alasan untuk melakukan diskriminasi oleh kelompok dorminan terhadap kelompok minoritas (Yakin, 2005).

Bentuk diskriminasi ada dua macam, yaitu diskriminasi institusional dan diskriminasi individual. Diskriminasi individual yaitu bersikap tidak adil kepada orang lain hanya karena alasan pribadi belaka. Diskriminasi ini biasanya dilakukan oleh mdividu-individu. Seorang guru tidak memperdulikan salah seorang muridnya, la tidak peduli apakah si murid itu paham atau tidak terhadap apa yang dijelaskannya. Si guru berbuat demikian hanya karena dia mempunyai perasaan tidak suka secara pribadi terhadap si murid (Yakin, 2005).

Diskriminasi institusional yaitu perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari golongan tertentu, terutama dari kelompok

mayoritas, di dalam institusi-institusi atau organisasi-organisasi pemerintahan maupun swasta. Diskriminasi institusional ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang dari golongan tertentu yang dominan dan sangat kuat dalam sebuah institusi, sehingga terlihat, seakan-akan, institusi itu yang melakukan diskriminasi. Di dalam sebuah kantor pemerintahan yang mayoritas pegawainya berasal dari suku "N" maka jabatan-jabatan strategis, terutama jabatan kepala kantor, akan selalu diduduki oleh orang-orang yang berasal dari suku yang sama, apabila ada orang lain yang berasal dari suku lainnya, maka ia akan mendapat kesulitan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di kantor tersebut. Diskriminasi institusional juga dapat terjadi pada wilayah-wilayah sosial yang lebih luas seperti desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan bahkan dapat terjadi dalam sebuah institusi negara.

Para siswa yang hidup di tengah-tengah masyarakat multietnik dan multikultur menghadapi berbagai kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Mereka mengalami dan melihat kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungannya terkait dengan masalah diskriminasi ini dengan intensitas yang berbeda-beda. Nilai-nilai multikulturalisme digunakan untuk mengetahui seberapa besar kejadian deskriminatif yang dialami oleh siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Dari penjarangan informasi di lapangan yang terkait dengan persoalan sensitivitas etnik, antara lain atribut etnik, bahasa, dan perlakuan. Informasi yang diperoleh bahwa: (i) pengalaman siswa yang pernah mendapat ejekan dari pihak lain karena atribut keetnikannya sebesar 229 orang atau 32% dari jumlah responden 706 orang. (ii) Pengalaman siswa pernah melihat orang lain mendapat perlakuan deskriminatif karena keetnikan bahasanya. Pengalaman melihat orang lain bersikap deskriminatif, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat karena berbicara dengan bahasa daerahnya sebesar 266 siswa dari jumlah responden 706 orang. Ejekan karena penggunaan logat daerahnya pernah dialami oleh 350 siswa dari jumlah responden 706 orang. (iii) Pengalaman mendapat perlakuan tidak adil karena keetnikan yang berbeda sebesar 137 siswa dari jumlah responden 703 orang.

Dari data kuantitatif poin (i) s.d. (iii) di atas dapat ditafsirkan bahwa diskriminasi masih menyelimuti kehidupan sosial para siswa. Pilihan pada jawaban pada kolom "pernah" membuktikan bahwa di lingkungan masyarakat para siswa masih memiliki intensitas kejadian yang cukup tinggi. Menurut pengakuan sebagian siswa bahwa dirinya pernah mendapat perlakuan dan pernah memperlakukan orang lain secara deskriminatif. Pengakuan para siswa tersebut menunjuk bahwa di kalangan siswa masih ada sikap deskriminatif. Artinya, wawasan multikulturalisme siswa masih kurang baik. Kebilingualan siswa masih belum berfungsi optimal sebagai sarana pemahaman budaya secara lintas etnik. Kondisi ini harus diubah melalui penerapan pendidikan multikulturalisme sejak dini.

4. Kesimpulan

Pengajaran bahasa daerah di sekolah sangat berpengaruh pada bilingualisme anak didik. Namun tidak semua siswa memperoleh kemampuan yang sama. Pengaruh yang cukup signifikan diperoleh oleh siswa yang bahasa ibunya tidak diajarkan di sekolah. Siswa yang mendapat kemampuan bilingualisme ini adalah siswa dari golongan etnik minoritas, misalnya etnik Using atau Madura di Jember, etnik Jawa atau Using di Situbondo, atau etnik Madura di Banyuwangi. Siswa dari golongan minoritas justru memperoleh repertoire linguistik yang lebih luas jika dibandingkan dengan siswa dari golongan mayoritas.

Siswa dari golongan etnik minoritas secara signifikan memiliki kesanggupan untuk membuat jaringan sosial yang lebih luas dibandingkan dengan siswa dari golongan etnik mayoritas. Repertoire linguistik yang dimiliki memungkinkan mereka menjalin interaksi sosial dengan orang lain beda etnik.

Siswa golongan etnik minoritas lebih akomodatif terhadap siswa lain yang berbeda etnik. Sikap akomodatif mereka wujudkan dalam perilaku bahasa yang berupa alih bahasa. Siswa golongan etnik mayoritas cenderung menggunakan bahasa Indonesia dalam menjalin interaksi sosial dengan orang lain yang berbeda etnik dengan dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Faruk H.T., I Dewa Putu Wijana, Kris Budiman, dan Melani Budianta. 2002. *Analisis Wacana: dari Linguistik sampai Dekonstruksi*. Yogyakarta: Kanak.
- Fay, Brian. 1996. *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach*. Oxford: Blackwell.
- Gumperz, J. and Hymes, D. (eds.). 1972. *Direction in Sociolinguistics*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Jary, David dan Julia Jary. 1991. "Multiculturalism". Hal. 319. *Dictionary of Sociology*. New York: Harper.
- May, Larry, dan Shari Collin. 2001. *Etika Terapan I dan II: Sebuah Pendekatan Multikultural*. Penerjemah Sinta Caroline, dkk. Yogyakarta: Gad.jah Mada University Press.
- Muhadjir, Noeng. 2004. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research, Integrasi Penelitian, Kebijakan. dan Perencanaan*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigms Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Social Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nababan, PWJ. 1984. *Sosiolinguistik suatu Pengantar*. Gramedia: Jakarta.
- Nieto, Sonia. 2000. *Affirming Diversity: The Sociopolitical Cotext of Multicultural Education*. New York: Longman.
- Ohiowutun, Paul. 1997. *Sosiolinguistik.: Memahami Bahasa dalam Konteks Masyarakat dan Kebudayaan*. Jakarta: Visipro.
- Pamungkas, Arie Setyaningrum. 2003. "The Australian Multiculturalism and the Global Challenges". *Thesis* (unpublished). University of Sydney: Australia.
- Poedjosoedarmo, Soepomo, Th. Kundjono, Gloria Soepomo, Alip, dan Suharso. 1979. *Tingkat Tutur Bahasa Jawa*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rahardjo, Turnomo. 2005. *Menghargai Perbedaan Kultural: Mindfulness dalam Komunikasi Antaretnis*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sudaryanto. 1990. *Menguak Fungsi Hakiki Bahasa*. Duta Wacana University

Press: Yogyakarta.

Suparlan, Parsudi. 2002. "Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia" ..Jurnal Antropologi Indonesia. No. 6. hal. 1-12.

Supriyoko, Ki. 2005. *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat: dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Suyanto, Budi. 2007a. "Adaptasi Linguistik Antarbahasa dalam Masyarakat Multilingual: Kajian Sociolinguistik Berbasis Multikulturalisme". Laporan Penelitian. Jember: Lemlit Universitas Jember.

-----2007b. "Pemilihan Bahasa dalam Masyarakat Multilingual di Kabupaten Jember". Dalam Jurnal Semiotika. Vol. 9 (2) Juli-Desember, Tahun 2007.

-----2008a. Adaptasi Bahasa dalam Proses Asosiatif Antaretnik di Kabupaten Jember. Dalam Jurnal Sosiologi. Vol. I(1) Januari-Juni Tahun 2008.

-----2008b. "Pemilihan Bahasa dalam Interaksi Sosial Antaretnik di Kabupaten Jember". Makalah Seminar Internasional: Menyambut 80 Tahun Prof. Drs. M. Ramlan. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

Tilar, H.A.R. 2005. "Pendidikan dalam Multi kultural isme". Dalam Ki Supriyoko (ed.). *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat: dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Watson, C.W. 2000. *Multiculturalism*. Buckingham-Philadelpia: Open University Press.

West, Cornet. 1993. "Prophetic Thought in Postmodern Times". Dalam *Beyond Eurocentrism and Multiculturalism*. Vol. 1. Monroe: Common Courage Press.

Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi.

-----2005. "Pemertahanan Dialek Banyumas terhadap Dominasi Dialek Solo-Yogya". Dalam Jurnal *Humaniora: Jurnal Budaya, Sastra, dan Bahasa*. Vol. 17, No. 2 Juni 2005. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

Wolff, John U. dan Soepomo Poedjosoedarmo. 1982. *Communicative Code in Central Java*. New York: The Cornell University South East Asia Program.

Yakin, Ainul. 2005. *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Nuansa Aksara.